

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun data yang dapat disimpulkan dari hasil dan pembahasan dari bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan pajak hotel dan pajak restoran bagi PAD Surakarta dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 1999 – 2003 mengalami kenaikan, karena perekonomian daerah kota Surakarta yang menalami peningkatan dari tahun ketahun, akan tetapi kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Surakarta cenderung menurun (mengalami penurunan).
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan pajak hotel dan pajak restoran yaitu kurangnya transparansi dari wajib pajak yang bersangkutan dalam memberikan data, kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar 10 % dari sekian rupiah yang disetorkan oleh wajib pajak tersebut, tingkat pemahaman dari para wajib pajak masih kurang, mereka tidak menerapkan pajak kepada konsumen yang datang.

Upaya peningkatan yang optimal dalam menjamin likuiditas keuangan daerah yaitu menginventarisasi data obyek dan subyek pajak, mengevaluasi dan perhitungan potensi, meningkatkan kemampuan SDM,

meningkatkan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan motivasi yang baik.

B. Saran

Setelah menyelesaikan beberapa bab mengenai isi dan kesimpulan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penambahan jadwal pemeriksaan di setiap hotel dan restoran, sehingga penyelenggaraan Pajak Hotel dan Restoran akan lebih tertib dan mengurangi penyalahgunaan penggunaan Nota Penjualan (Bill) dan data-data yang tidak benar.
2. Perlu dilakukan pendataan secara benar mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Pengarahan-pengarahan yang lebih luas kepada semua wajib pajak hotel dan restoran, dan kepada semua masyarakat dengan maksud agar masyarakat memahami Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kewajiban yang harus dilakukan baik melalui media massa maupun elektronik.
4. Perlu adanya suatu pelatihan bagi aparat daerah supaya lebih terampil dalam mengelola sumber pendapatan daerah.
5. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi lain agar dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Dipenda Surakarta Dalam Era Globalisasi Dan Prospek Otonomi, Surakarta.
2. HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
3. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
4. Kesit Bambang Prakosa, Pajak dan Retribusi Daerah, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2005.
5. Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco Bandung, 1992.
6. -----, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, PT. Eresco Edisi IX Bandung, 1977.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2002 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2002 tentang Pajak Restoran.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 24 tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : happeda_diy@p!asa.com

Nomor : 0701/9190
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 8 Nopember 2004

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah

c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum UAJ Yk

Nomor : 0380/V

Tanggal : 5 Nopember 2004

Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : VICTORIA KICKY RESPATI RATNA P.

No. Mhs. : 970506322

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SURAKARTA

Waktu : 8 Nopember 2004 s/d 8 Februari 2005

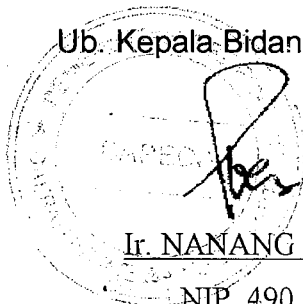
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Ir. NANANG SUWANDIMMA

NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UAJ Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

no. 070/17/x/1 2004

MENGETAHUI 12 NOV 2004

TELAH DATANG...
An. KEP... ANTOR KESBA...
K... P... MNC

RIPTONO

SAPATAN...
... hasil darvey...
... Kesbang...
... Surakarta

IJIN MENGADAKAN PENELITIAN / RESEARCH

NOMOR : ...16... XL... 107

TANGGAL : ...21-2004...

An. KEP... AN DAERAH

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BADAN
PERENCANAAN DAERAH
MARGARETHA
NIP. 010086472
SURAKARTA